



PENERAPAN NILA-NILAI DEMOKRASI MELALUI PEMBELAJARAN PPKn

Bayyina Tullaila, Rara Diah Pertiwi, Siti Tiara Maulia

Universitas Jambi

bayyinatulaillah@gmail.com

Abstract

The purpose of writing this research is to equip Civics teachers with alternative ways of instilling democratic values through Civics learning. The research method used in this paper is the library research method, where data is collected by digging up various information from the literature. The results of this study were obtained when the introduction of democratic values through Civics learning was successful, even though the process was not easy. This is because there are still too many topics and materials in Civics subjects. This can affect the interest and motivation of student learning. Civics teachers, like subject teachers, must carefully study the material used as a tool for instilling democratic values, because not all materials can be used. The method used to promote democratic values that is most appropriate is a discussion that arises from the characteristics of the method that allows students to apply appropriate social skills.

Abstrak

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk membekali guru ppkn dengan alternatif cara menanamkan nilai-nilai demokrasi melalui pembelajaran PPKn. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan, dimana data dikumpulkan dengan cara menggali berbagai informasi dari literatur. Hasil penelitian ini didapatkan ketika pengenalan nilai-nilai demokrasi melalui pembelajaraNn PPKn berhasil, meskipun prosesnya tidak mudah. Hal ini dikarenakan masih terlalu banyak topik dan materi dalam mata pelajaran PPKn. Hal ini dapat mempengaruhi minat dan motivasi belajar siswa. Guru PPKn seperti halnya guru mata pelajaran harus mempelajari dengan seksama materi yang digunakan sebagai alat penanaman nilai-nilai demokrasi, karena tidak semua materi dapat digunakan. Metode yang digunakan untuk mendorong nilai-nilai demokrasi yang paling tepat adalah diskusi yang muncul dari karakteristik metode yang memungkinkan siswa menerapkan berbagai keterampilan sosial yang sesuai.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Dasar demokrasi Indonesia terkandung dalam dasar negara Indonesia, yaitu sila kedua Pancasila yang menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila keempat yang menjunjung tinggi demokrasi yang berpedoman pada hikmat kebijaksanaan dalam perundingan perwakilan. Pernyataan bahwa negara Indonesia diatur dengan sistem demokrasi juga terdapat dalam Pasal 1 (1) UUD 1945, demokrasi yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Kata demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat dan “kratos” yang berarti pemerintahan. Demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan yang dipimpin oleh rakyat. Secara harfiah, demokrasi biasanya merupakan suatu sistem pemerintahan atau politik. Namun seiring perkembangan semangat zaman (zeitgeist),

Article History

Received: 15 Maret 2023

Reviewed: 20 Maret 2023

Published: 5 April 2023

Key Words

Social media, Democracy, Millennial generation.

Sejarah Artikel

Received: 15 Maret 2023

Reviewed: 20 Maret 2023

Published: 5 April 2023

Kata Kunci

Nilai-Nilai Demokrasi, PPKn, Pembelajaran PPKn



demokrasi mengalami evolusi makna. Demokrasi bukan hanya sistem pemerintahan atau politik, tetapi juga cara hidup dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan dengan semakin tingginya perkembangan dan pertumbuhan masyarakat, maka kompleksitas kehidupan masyarakat menjadi semakin sulit, sehingga sulit untuk mendefinisikan demokrasi. Setidaknya dikenal tiga dimensi demokrasi saat ini, yaitu demokrasi sebagai sistem administrasi, sistem politik, dan sikap hidup. Menurut Jon Dewey, sikap demokratis tumbuh ketika masyarakat sudah memiliki sistem yang mengatur kegiatan dengan baik baik secara internal maupun eksternal. Sistem ini dilaksanakan bukan dengan paksaan, tetapi dengan kesadaran individu dalam masyarakat. Seperti dikemukakan Mohammad Hatta, demokrasi didasarkan pada tanggung jawab dan toleransi (Hatta, 1966). Sikap demokratis yang berlaku di masyarakat termasuk dalam nilai-nilai demokrasi. Menurut Amril Mansur, harga diri memiliki indikator tingkat praktis seperti daya tarik, keinginan, menyenangkan, diinginkan dan dihormati atau memiliki arti positif (Mansur, 2006).

Nilai-nilai demokrasi merupakan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan berdemokrasi sebagai makhluk sosial ketika menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di lingkungan, nilai-nilai demokrasi memiliki empat indikator, antara lain (1) menyelesaikan masalah secara damai dan bersama; (2) menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam lingkungan yang berubah; (3) mengenali dan mempertimbangkan keberagaman secara wajar; (4) menjamin tegaknya keadilan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menanam adalah proses, cara, menanam, mengolah atau menanam. Sementara itu, makna nilai dalam KBBI dapat diartikan sebagai sifat-sifat penting atau berguna bagi kemanusiaan; atau sesuatu yang melengkapi manusia menurut kodratnya (etika). Penanaman nilai dalam perspektif pendidikan dapat diartikan sebagai proses (a) mengubah pengetahuan konseptual menjadi tindakan yang dapat (bermanfaat) diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pengenalan nilai, individu diharapkan mampu berfungsi sebagai bagian dari komunitas atau masyarakat sesuai dengan peran dan nilai-nilainya. Penanaman nilai dapat dilakukan melalui proses pendidikan baik formal maupun informal. Pendidikan informal berlangsung dalam keluarga, sedangkan pendidikan formal berlangsung melalui lembaga pendidikan seperti sekolah. Penanaman nilai-nilai demokrasi melalui pendidikan formal terjadi dalam proses pembelajaran. Pembelajaran adalah pekerjaan terencana untuk memanipulasi sumber belajar sedemikian rupa sehingga pembelajaran berlangsung dalam diri siswa (Sardiman, 2014). Salah satu pelajaran yang dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi adalah pendidikan kewarganegaraan. PPKn merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah menengah pertama (SMP) dan juga di sekolah menengah atas (SMA).

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan (library research). Metode Sastra (library research), yaitu kajian yang berkaitan dengan serial metode pengumpulan data



kepastakaan atau penelitian yang topik penelitiannya sedang dipelajari melalui berbagai data literatur (Syaodih, 2009). Menurut (Denney & Tewksbury, 2013) Tinjauan pustaka adalah tinjauan menyeluruh terhadap penelitian yang dilakukan dibuat pada topik tertentu untuk menunjukkan kepada pembaca apa yang Anda dapat sudah diketahui tentang subjek dan apa yang belum diketahui rasional untuk penelitian yang dilakukan atau ide untuk penelitian lebih lanjut. Sumber yang digunakan dalam metode kepastakaan tersebut adalah jurnal ilmiah yang studi sebelumnya terkait dengan pembelajaran PPKn yang relevan topik penelitian dan buku teks yang berkaitan dengan ilmu sosial dan pendidikan sekitar pengumpulan data dilakukan dengan mengunjungi perpustakaan atau melalui internet. Setelah mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan penulis melakukan proses verifikasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan penulis dari sumber manapun.

PEMBAHASAN

Hakikat mata pelajaran pendidikan pancasila dan ilmu kewarganegaraan (PPKn)

A. Hakikat mata pelajaran pendidikan pancasila dan ilmu kewarganegaraan (PPKn)

Secara bahasa, istilah Civic Education oleh sebagian pakar diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewargaan. Pendidikan Kewarganegaraan dirumuskan secara luas untuk mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga Negara, dan secara khusus peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran dan belajar dalam proses penyiapan warga Negara tersebut (Mulyani S Fadilla, 2013) .

Pada dasarnya Pancasila menjadi dasar asas bagi pendidikan nasional dan Pancasila itu ada dalam PKN. PKN secara umum bertugas mendidik warga negara agar paham dan menjadi warga negara yang baik. Dengan menyampaikan Pancasila melalui pendidikan kewarganegaraan mendidik agar warga negara tahu local wisdom, pengalaman sejarah, sistem kenegaraan, sadar apa yang ada dalam negara, tahu hak dan kewajibannya sehingga nanti kita tidak kehilangan jatidiri bangsa, bukan melulu demokrasi.

B. Hakikat Nilai demokrasi

Demokrasi merupakan salah satu paham atau ideologi yang ada dan telah diterapkan di berbagai negara dan bangsa. Indonesia merupakan negara yang sejak awal kemerdekaannya telah memilih demokrasi sebagai landasan berbangsa dan bernegara. Bahkan demokrasi



secara kontekstual telah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Secara harfiah demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan). Demokrasi juga dapat diartikan dengan kekuasaan yang berada di 'tangan' rakyat atau didasari pada kehendak rakyat. Demokrasi sebagai pandangan politik ialah bagaimana kekuasaan berasal, didapatkan dan digunakan untuk kepentingan bersama.

Nilai adalah karakter yang baik dan apa yang pantas untuk orang dalam hal keyakinan, kepercayaan, norma dan perilaku. Secara teoritis, nilai pada dasarnya terkait dengan esensi dan tujuan. Singkatnya, nilai mengacu pada perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Notonegoro, nilai dibagi menjadi tiga kategori, yaitu (1) nilai material, segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia, (2) nilai esensial, segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitas dan perbuatan, (3) Nilai spiritual, segala sesuatu yang berguna bagi manusia, untuk spiritualitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

Menurut (Notonagoro, 2013) terdapat empat indikator nilai demokrasi, diantaranya (1) menyelesaikan persoalan secara damai dan bersama; (2) menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu lingkungan yang sedang berubah; (3) mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman; (4) menjamin tegaknya keadilan.

Berdasarkan berbagai uraian mengenai nilai demokrasi maka dapat disimpulkan, jika nilai demokrasi merupakan keyakinan yang terdapat di masyarakat, yang menjadi pedoman dalam berkehidupan berdemokrasi. Nilai demokrasi yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada indikator nilai demokrasi menurut Notonagoro. Nilai demokrasi merupakan sikap toleransi, menghormati perbedaan pendapat, memahami dan menyadari keanekaragaman di lingkungan sekolah, mampu mengendalikan diri sehingga tidak mengganggu orang lain, kebersamaan, percaya diri tidak menggantungkan diri pada orang lain dan mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah (Nurul Zuriah, 2014). Nilai-nilai demokrasi sangat perlu untuk ditanamkan pada diri peserta didik. Tujuannya untuk menghadirkan proses pembelajaran yang lebih demokratis di sekolah. Selain itu nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan ke dalam peserta didik nantinya diharapkan akan menjadi pribadi yang baik sebagai individu maupun anggota komunitas.



Nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran kewarganegaraan bagi suatu institusi merupakan proses pembinaan, penanaman, dan pewarisan nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan yang diselenggarakan dalam lingkungan pendidikan, karena dipandang memiliki peranan penting dan strategis dalam penanaman nilai-nilai demokrasi, karena nilai-nilai demokrasi tidak hanya berkenaan dengan materi yang diajarkan oleh guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) kepada siswa, melainkan siswa harus benar-benar memahami bentuk nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yang diajarkan atau disampaikan oleh guru didalam ruangan kelas, dan siswa harus menerapkan atau menanamkan nilai-nilai demokrasi yang sudah diajarkan oleh guru PPKn dilingkungan sekolah. Kebebasan dalam berpendapat, kebebasan dalam persurat kabaran, kebebasan dalam berkumpul atau berorganisasi, kebebasan dalam beragama, (Mukram S: 1997).

Salah satu mata pelajaran yang memiliki nilai-nilai demokrasi di dalamnya ialah mata pelajaran PPKn. Mata pelajaran memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam membuat keputusan yang informatif dan rasional sebagai warga negara yang baik dari budaya yang berbeda-beda, serta dalam konteks masyarakat yang demokratis. Setidaknya terdapat empat indikator nilai-nilai demokrasi menurut Notonegoro (2013) yang dapat disinergikan dengan Pendidikan PPKn, antara lain:

1. Menyelesaikan persoalan secara damai dan bersama.

Dalam kehidupan sosial, siswa dihadapkan pada keadaan dan masalah yang berbeda. Konflik merupakan salah satu kondisi dan masalah yang dihadapi siswa. Konflik atau pertentangan selalu terjadi di masyarakat. Ketidaksepakatan biasanya menjadi masalah dalam setiap konflik, baik itu antar individu, kelompok individu, maupun konflik antar kelompok. Namun yang terpenting adalah bagaimana peserta didik dapat menyelesaikan konflik tersebut secara damai dan bersama-sama. Dimana peserta didik memahami apakah perbedaan yang ada merupakan bagian dari dinamika masyarakat dan proses demokrasi. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nilai PPKn yaitu menanamkan nilai-nilai moral pada siswa agar siswa menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu lingkungan yang sedang berubah.



Masyarakat sebagai tempat peserta didik menjalani kegiatan sehari-hari sangat dinamis. Hal ini disebabkan oleh berbagai pengaruh yang dialami masyarakat baik secara eksternal maupun internal. Akibatnya, masyarakat terus mengalami perubahan sosial, baik cepat maupun lambat, besar atau kecil, disengaja atau tidak disengaja. Dalam hal ini, pendidikan PPKn membekali siswa dengan pemahaman bahwa perubahan dalam masyarakat merupakan proses yang normal dan alami. Hal ini sesuai dengan proses kompetensi ilmu sosial secara umum yang dimiliki siswa, yaitu kemampuan mengkomunikasikan, mengidentifikasi, serta menganalisis dan menyusun solusi sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (BSNP, 2007).

3. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman.

Keanekaragaman/Kebhinekaan merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Keberagaman yang relevan, mulai dari keragaman ras, suku, agama dan bahasa. Oleh karena itu, peserta didik harus menganggap bahwa keragaman yang ada merupakan hal yang wajar dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan pembentukan karakter pkn yaitu memberikan pengetahuan moral, perasaan moral dan perilaku moral sebagai dasar kehidupan sehari-hari.

4. Menjamin tegaknya keadilan.

Penegakan keadilan, menurut pemahaman Notonegoro, merupakan titik akhir dari nilai-nilai demokrasi yang dapat dipadukan secara sinergis dalam pembelajaran kewarganegaraan. Indonesia adalah negara hukum. Dimana seluruh masyarakat tanpa memandang perbedaan status sosial harus menaati hukum yang berlaku yaitu UUD 1945. Hukum berfungsi sebagai pedoman bagi setiap individu untuk hidup bernegara dan menegakkan keadilan. Akan tetapi, dari segi sosial, keadilan ditujukan tidak hanya dari segi hukum, tetapi juga dari segi sosial. Hal ini sesuai dengan definisi PPKn, yaitu bidang studi yang menyelidiki, mendalami, membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan mendasar yang berkaitan dengan hubungan kemasyarakatan dan pra pendidikan untuk bela negara agar menjadi warga negara yang dapat dipercaya. bangsa dan negaranya.

Penanaman nilai-nilai demokrasi melalui pembelajaran PKn dapat dilakukan dengan menyisipkannya di dalam setiap materi yang terdapat dalam sub tema pada mata pelajaran PKn.



1. Penanaman nilai-nilai demokrasi dalam sub tema hak asasi manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia merupakan salah satu sub tema dalam mata pelajaran PKN. Dimana para peserta didik akan mempelajari konteks manusia yang hidup di dalam ruang dan waktu. Peserta didik akan mempelajari tentang adanya HAM, dimana HAM adalah dua kata yang sulit dipisahkan. Manusia dilahirkan dengan hak kodrati yang melekat dalam kehidupan karena dilahirkan di bumi. Pada tingkat yang sangat mendasar, manusia adalah makhluk bebas yang dapat berpikir dan bertindak secara bebas.

Nilai-nilai demokrasi dapat dimasukkan ke dalam materi-materi yang terdapat pada tema Hak Asasi Manusia dalam mata pelajaran PKn. Salah satu materi yang terdapat tema Hak Asasi Manusia yang dapat digunakan untuk menjadi media penanaman nilai-nilai demokrasi, seperti manusia, ruang dan waktu . Dari artikel ini guru dapat membantu peserta didik dalam memetik nilai-nilai demokrasi sesuai indikator nilai demokrasi Notonegoro (1) menyelesaikan persoalan secara damai dan bersama (2) menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu lingkungan yang sedang berubah. Dimana guru dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik jika perubahan yang terjadi di dalam masyarakat merupakan konsekuensi logis atas terjadinya interaksi sosial. Selain itu guru dapat menampilkan beberapa contoh perubahan-perubahan di masyarakat yang terjadi akibat dari interaksi sosial. Nilai demokrasi menurut Notonegoro lainnya yang dapat ditanamkan melalui materi pada pembelajaran PPKn, yakni (3) mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dapat ditanamkan melalui materi heterogenitas sosial. Dimana pelapisan sosial merupakan bagian dari heterogenitas sosial merupakan hal yang wajar dan merupakan ciri yang tetap dan umum dalam masyarakat. Guru dapat memberikan berbagai contoh heterogenitas sosial yang terjadi di sekitar kehidupan sehari-hari peserta didik. dan (4) tegaknya keadilan. Pada artikel ini dapat diketahui jika Ki Hadjar Dewantara bersama dua rekannya tetap menyikapi perlakuan Pemerintah Hindia Belanda yang semena-mena secara damai dan lebih memilih mematuhi proses hukum walaupun diperlakukan tidak adil.

KESIMPULAN

Nilai-nilai demokrasi merupakan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan berdemokrasi sebagai makhluk sosial ketika menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di lingkungan, Nilai-nilai demokrasi yang dimaksud antara lain toleransi, menghormati perbedaan pendapat, memahami, dan menyadari jika kemajuan merupakan kekuatan, serta



mampu mengendalikan diri untuk hidup dalam kemajuan yang ada. Nilai-nilai demokrasi yang terdapat di masyarakat perlu untuk dipertahankan secara kontekstual. Agar nilai-nilai demokrasi dapat bertahan, salah satu caranya ialah melalui proses pembelajaran yang merupakan tahap instruksional dalam pendidikan.

Pembelajaran PPKn sebagai salah satu pembelajaran yang ada dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi. Penanaman nilai demokrasi dilakukan dengan menyisipkannya di dalam setiap materi dalam tema-tema pembelajaran PPKn. Seperti penanaman nilai demokrasi dalam sub tema pada pembelajaran PPKn dapat disisipkan pada materi HAM karena manusia adalah makhluk bebas yang dapat berpikir dan bertindak secara bebas.

Penanaman nilai-nilai demokrasi melalui pembelajaran PPKn dapat dilakukan, meskipun prosesnya tidak terbilang mudah. Hal ini dikarenakan banyaknya materi dalam tema pada mata pelajaran PPKn. Banyaknya materi tentu akan memakan waktu yang tidak sedikit dalam pembelajaran. Alhasil guru secara tidak sadar akan terorientasi pada penyelesaian materi pembelajaran, bukan pada capaian pembelajaran yang sudah ditentukan. Selain itu banyaknya materi pada setiap tema pembelajaran PPKn akan berdampak tidak langsung kepada minat dan motivasi belajar peserta didik. Maka dari itu penanaman nilai demokrasi dalam pembelajaran PPKn harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ditemukan oleh guru.

Daftar Pustaka

- Denney, A. S., & Tewksbury, R. (2013). How to write a literature review. *Journal of Criminal Justice Education*, 24(2), 218–234.
- Hatta, M. (1966). *Demokrasi kita*. Pustaka Antara.
- Galuh Mahardika, M. D., & Nur Ramadhan, F. (2021). Pembelajaran IPS sebagai penguat nasionalisme dalam menghadapi tantangan di era globalisasi. *Jurnal Teori Dan Praksis Pembelajaran IPS*, 6(2), 78–91.
- Mansur, A. (2006). Implementasi Klarifikasi Nilai Dalam Pembelajaran dan Fungsionalisasi Etika Islam. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 5(1), 44–69.
- Maryam, S., Nuswantari, N., & Kokotiasa, W. (2022, August). Impelementasi nilai-nilai demokrasi pada mata pelajaran PKn dalam pembentukan karakter demokratis siswa kelas 8 di SMP Negeri 11 Madiun. In *SEMINAR NASIONAL SOSIAL, SAINS, PENDIDIKAN, HUMANIORA (SENASSDRA)* (Vol. 1, No. 1, pp. 538-546).
- Ramdani, R., & Dewi, D. A. Furnamasari Y.F. (2021). Implementasi Nilai-nilai Demokrasi dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 9034-9038.
- Sardiman. (2014). *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Rahagrafindo persada.
- Syaodih, N. (2009). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Zulhilmi, A. (2022). DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PANDANGAN ISLAM. *Jurnal Darma Agung*, 30(2), 254-265.